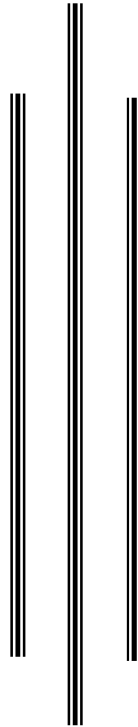




**LURAH HARGOSARI
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN HARGOSARI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KALURAHAN HARGOSARI
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH KALURAHAN HARGOSARI
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN HARGOSARI
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN HARGOSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH HARGOSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor : 12,13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4));

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
22. Peraturan Desa Hargosari Nomor 09 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Hargosari Tahun 2016 Nomor 9);
23. Peraturan Desa Hargosari Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Hargosari Tahun 2018 s/d 2024 (Lembaran Desa Hargosari Tahun 2019 Nomor 02);
24. Peraturan Kalurahan Hargosari Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Hargosari Tahun 2024 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN HARGOSARI
dan
LURAH HARGOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | Rp. | 2.301.109.700,00 |
| 2. Belanja Kalurahan | <u>Rp.</u> | <u>2.313.109.700,00</u> |
| <i>Surplus/ Defisit</i> | <i>(Rp</i> | <i>12.000.000,00)</i> |
| 3. Pembiayaan Kalurahan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 112.000.000,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> | <u>100.000.000,00</u> |
| <i>Selisih Pembiayaan (a- b)</i> | <i>Rp.</i> | <i>12.000.000,00</i> |
| Surplus (defisit) | Rp. | 0 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan
ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika Ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal;

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Hargosari.

Ditetapkan di : Hargosari
pada Tanggal : 31 Desember 2024
LURAH HARGOSARI



JUMENO

Diundangkan di : Hargosari
pada tanggal : 31 Desember 2024
CARIK KALURAHAN HARGOSARI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Wahyu Eka Prihantara", is written over a rectangular stamp area.

WAHYU EKA PRIHANTARA

LEMBARAN KALURAHAN HARGOSARI TAHUN 2024 NOMOR ..

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN HARGOSARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 75.000.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.222.109.700,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 4.000.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.301.109.700,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 788.624.964,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 847.315.736,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 602.369.000,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 74.800.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 2.313.109.700,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (12.000.000,00) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 112.000.000,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 112.000.000,00 | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 12.000.000,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Hargosari, 30 December 2024



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN HARGOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|--|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 75.000.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.222.109.700,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 4.000.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 2.301.109.700,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>1.244.078.700,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 956.939.080,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 48.528.000,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 48.528.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 634.541.100,00 | ADD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 634.541.100,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 44.508.084,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 44.508.084,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) | 69.588.636,00 | ADD, PAD, PBH |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 69.588.636,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 61.047.780,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 61.047.780,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 7.400.000,00 | ADD, PBH |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.400.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 55.882.980,00 | PBH |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 55.882.980,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 35.442.500,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 35.442.500,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 152.450.800,00 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 24.900.000,00 | DLL, PAD, PBH |
| 1.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 24.900.000,00 | |
| 1.2.03 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 116.750.800,00 | DDS |
| 1.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 116.750.800,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.91 | | Pengadaan Mebel | 2.300.000,00 | PBH |
| 1.2.91 | 5.3. | Belanja Modal | 2.300.000,00 | |
| 1.2.94 | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 4.700.000,00 | PAD, PBH |
| 1.2.94 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.700.000,00 | |
| 1.2.95 | | Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja | 3.800.000,00 | DLL, PBH |
| 1.2.95 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.800.000,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 25.723.700,00 | |
| 1.3.01 | | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1.480.000,00 | PAD |
| 1.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.480.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 9.023.700,00 | DDS, PBP |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.023.700,00 | |
| 1.3.90 | | Penyusunan Monografi Desa | 400.000,00 | DLL |
| 1.3.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 400.000,00 | |
| 1.3.91 | | Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin | 14.820.000,00 | PBP |
| 1.3.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.820.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 104.490.120,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 28.805.000,00 | DDS |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 28.805.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 2.640.000,00 | PAD |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.640.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll) | 5.262.500,00 | PBH |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.262.500,00 | |
| 1.4.05 | | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa | 4.975.000,00 | PBH, PBP |
| 1.4.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.975.000,00 | |
| 1.4.06 | | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 6.405.000,00 | PBP |
| 1.4.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.405.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 580.120,00 | PBH |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 580.120,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 6.700.000,00 | DDS |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.700.000,00 | |
| 1.4.90 | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran | 7.600.000,00 | PBH |
| 1.4.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.600.000,00 | |
| 1.4.91 | | Pengisian Perangkat Desa | 31.172.500,00 | ADD, PAD, PBH |
| 1.4.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 31.172.500,00 | |
| 1.4.95 | | Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam | 10.350.000,00 | ADD |
| 1.4.95 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.350.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 4.475.000,00 | |
| 1.5.06 | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 3.075.000,00 | PBH |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.075.000,00 | |
| 1.5.99 | | Lain-lain Sub Bidang Pertanahan | 1.400.000,00 | PBH |
| 1.5.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.400.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>854.756.000,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 64.867.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 24.300.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 24.300.000,00 | |
| 2.1.90 | | Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa | 40.567.000,00 | DDS |
| 2.1.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 40.567.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 249.650.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif) | 38.410.000,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 38.410.000,00 | |
| 2.2.03 | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 3.425.000,00 | DDS |
| 2.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.425.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 50.565.000,00 | DDS |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 50.565.000,00 | |
| 2.2.08 | | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 23.337.000,00 | DDS |
| 2.2.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 23.337.000,00 | |
| 2.2.91 | | Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) | 5.550.000,00 | DDS |
| 2.2.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.550.000,00 | |
| 2.2.94 | | Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD | 35.175.000,00 | DDS |
| 2.2.94 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 35.175.000,00 | |
| 2.2.96 | | Pembinaan dan pengembangan Kampung KB | 5.200.000,00 | DDS |
| 2.2.96 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.200.000,00 | |
| 2.2.98 | | Insentif kader kesehatan/KB | 46.960.000,00 | DDS |
| 2.2.98 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 46.960.000,00 | |
| 2.2.99 | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan | 41.028.000,00 | PBP |
| 2.2.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 41.028.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 438.249.000,00 | |
| 2.3.12 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 90.057.000,00 | DDS |
| 2.3.12 | 5.3. | Belanja Modal | 90.057.000,00 | |
| 2.3.14 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 313.312.000,00 | DDS |
| 2.3.14 | 5.3. | Belanja Modal | 313.312.000,00 | |
| 2.3.16 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah | 34.880.000,00 | DDS |
| 2.3.16 | 5.3. | Belanja Modal | 34.880.000,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 101.540.000,00 | |
| 2.4.09 | | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa | 7.210.000,00 | DDS |
| 2.4.09 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.210.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.4.13 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **) | 71.055.000,00 | DDS |
| 2.4.13 | 5.3. | Belanja Modal | 71.055.000,00 | |
| 2.4.91 | | Pemberian stimulan jamban sehat | 23.275.000,00 | DDS, PBP |
| 2.4.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 23.275.000,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 450.000,00 | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 450.000,00 | DDS |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 450.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>90.460.000,00</u> | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 4.200.000,00 | |
| 3.1.90 | | Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana | 4.200.000,00 | PAD |
| 3.1.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.200.000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1.200.000,00 | |
| 3.2.02 | | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot) | 1.200.000,00 | DLL |
| 3.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 69.415.000,00 | |
| 3.3.05 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 65.865.000,00 | DDS |
| 3.3.05 | 5.3. | Belanja Modal | 65.865.000,00 | |
| 3.3.93 | | Operasional Karang Taruna | 3.550.000,00 | PAD |
| 3.3.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.550.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 15.645.000,00 | |
| 3.4.92 | | Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa) | 5.090.000,00 | DDS |
| 3.4.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.090.000,00 | |
| 3.4.95 | | Operasional LPMD dan/atau LPMP | 2.875.000,00 | PAD |
| 3.4.95 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.875.000,00 | |
| 3.4.96 | | Operasional PKK | 7.680.000,00 | PAD |
| 3.4.96 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.680.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>49.015.000,00</u> | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 4.525.000,00 | |
| 4.2.92 | | Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan | 4.525.000,00 | DDS |
| 4.2.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.525.000,00 | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 7.190.000,00 | |
| 4.3.02 | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 7.190.000,00 | PBP |
| 4.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.190.000,00 | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 15.950.000,00 | |
| 4.4.92 | | Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa | 4.100.000,00 | DDS |
| 4.4.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.100.000,00 | |
| 4.4.93 | | Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak | 6.250.000,00 | DDS |
| 4.4.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.250.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4.99 | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 5.600.000,00 | DDS |
| 4.4.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.600.000,00 | |
| 4.5. | | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 21.350.000,00 | |
| 4.5.90 | | Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion | 21.350.000,00 | DDS |
| 4.5.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 21.350.000,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u> | <u>74.800.000,00</u> | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | |
| 5.1.00 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | DDS |
| 5.1.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000,00 | |
| 5.2. | | Sub Bidang Keadaan Darurat | 5.000.000,00 | |
| 5.2.00 | | Penanganan Keadaan Darurat | 5.000.000,00 | DDS |
| 5.2.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 64.800.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 64.800.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 64.800.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 2.313.109.700,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (12.000.000,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 112.000.000,00 | |
| 6.2. | | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTC | 12.000.000,00 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Hargosari, 30 December 2024



JUMENO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
PEMERINTAH KALURAHAN HARGOSARI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦏꦗꦤꦶꦒꦱꦫꦶ

Jalan : Jln Wonosari – Tepus Km 12 Mojosari.Hargosari Kode Pos : 55881
Email:desahargosari@gmail.com. Website: <http://hargosari-Tanjungsari.desa.id>

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN HARGOSARI
DAN
LURAH HARGOSARI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN HARGOSARI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Kalurahan Hargosari Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Hargosari menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Hargosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKAL) Tahun Anggaran 2025.

Naskah Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Hargosari dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargosari dan Lurah Hargosari.

Badan Permusyawaratan
Kalurahan Hargosari
Ketua,



SARTONO



Lurah Hargosari,



JUMENO





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2025

KALURAHAN : HARGOSARI
KAPANEWON : TANJUNGSARI

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2025 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

| No | Catatan | Rekomendasi |
|----|--|---|
| 1 | Terdapat anggaran belanja Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang belum dilampiri Detail RAB Rinci sehingga tidak sesuai dengan SE Pedoman Penyusunan APBKal Tahun 2025 | Direkomendasikan kepada Lurah Hargosari agar dalam menganggarkan belanja Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dilampirkan Detail RAB Rinci sesuai dengan SE Pedoman Penyusunan APBKal Tahun 2025. |
| 2 | Terdapat penempatan jenis belanja belum sesuai dengan ketentuan (belanja barang/jasa dan belanja modal) meliputi: a. Rehabilitasi Gedung Kantor b. Rehabilitasi Gedung PAUD c. Rehabilitasi Gedung Polindes | Direkomendasikan kepada Lurah Hargosari agar menganggarkan belanja sesuai dengan peruntukannya (belanja barang/jasa dan belanja modal). |
| 3 | Terdapat anggaran belanja melebihi SHS Kalurahan Tahun 2025 meliputi: a. Uang Sidang Bamuskal b. Petugas Keamanan Pengisian Pamong c. Sewa Laptop Pengisian Pamong | Direkomendasikan kepada Lurah Hargosari agar menganggarkan belanja sesuai SHS Kalurahan Tahun 2025. |

| No | Catatan | Rekomendasi |
|----|--|---|
| 4 | Terdapat anggaran Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat berupa Belanja Babonisasi Mentok pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp44.400.000,00 (222 paket x @Rp200.000) | Direkomendasikan kepada Lurah Hargosari agar melakukan verifikasi ulang terhadap penerima bantuan dan melakukan perhitungan kembali terhadap Belanja Babonisasi Mentok sebesar Rp44.400.000,00 |
| 5 | Terdapat anggaran Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat berupa Belanja Bantuan Bibit Mangga pada Kegiatan Pemberdayaan Gapoktan sebesar Rp104.000.000,00 (1.600 buah x @Rp65.000) | Direkomendasikan kepada Lurah Hargosari agar berkoordinasi dengan Balai Penyuluhan Pertanian Tanjungsari dan melakukan pencermatan kembali terhadap Belanja Bantuan Bibit Mangga sebesar Rp104.000.000,00 |
| 6 | Terdapat anggaran Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal BUMKalma sebesar Rp50.000.000,00 yang belum disertai dengan Peraturan Lurah Bersama tentang penyertaan modal bersama. | Direkomendasikan kepada Lurah Hargosari agar menetapkan Peraturan Lurah Bersama tentang penyertaan modal bersama sebelum realisasi Penyertaan Modal BUMKalma sebesar Rp50.000.000,00. |

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 27 Desember 2024;

Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2025 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 30 Desember 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.



Lurah

JUMENO

Pendamping Desa

Ana Kadarismanto, S.IP

Kapanewon

Ngatija, S.IP, M.IP

NIP 197211161994021001

DPMKP2KB

Waziroh, S.IP, M.I.P

NIP 197603101995031001

Wonosari, 12 Desember 2024

Ketua Tim,

Richardus Saila, SE, M.Acc

NIP 198212022010011023

Pengendali Teknis,

Sri Intiyastuti, SE, MPA, CRMP

NIP 197809222006042006

Koordinator,

Asih Tri Wahyuni, S.STP, M.Si

NIP 198001151998102001